

BAB IV

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dilakukan analisis atas implikasi penerimaan Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses penerimaan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

4.1 Implikasi masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap Proses masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa

Dengan menggunakan pendekatan neo-liberal institusional, terutama dalam bentuk kerjasama yang dapat mendorong terjadinya integrasi regional serta disertai dengan asumsi-asumsi neoliberal institusionalis dan konsep-konsep lain yang mendukungnya, maka penyusunan hipotesis yang akan dikemukakan penulis mengenai implikasi masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa terhadap proses masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa melalui analisis, sebagai berikut.

Perspektif ini mempunyai empat asumsi dasar yaitu:

1. Neo-liberal institusionalis mengakui keberadaan aktor negara dan non negara. Menurut Keohane, negara merupakan perwakilan resmi yang memiliki legitimasi dari masyarakat
2. Bagi neo-liberal institusionalis, struktur sistem internasional berada dalam kondisi yang anarki. Kondisi sistem internasional yang anarki dapat diatasi melalui pembentukan institusi internasional yang berperan sebagai mediator. Selain itu, institusi internasional juga berperan sebagai tempat penyelesaian hukum internasional dan masalah-masalah internasional lainnya.
3. Interaksi pada tingkat regional dan global semakin meningkat sehingga semakin meningkat menjadi tahapan integrasi.
4. Neo-liberalis institusionalis berpendapat bahwa dunia ini bukan *zero sum game* dimana suatu aktor menang sedangkan aktor lainnya kalah. Namun

berupa *Variabel-sum game* yakni, melalui kerjasama. Semua aktor akan mendapatkan keuntungan bersama.⁹⁴

Sistem internasional yang anarki didefinisikan sebagai tidak adanya pemerintah pusat dalam sistem internasional yang dapat memaksakan peraturan, sebagai suatu standar dari masyarakat domestik. Neo-liberalinstitusionalis mengakui kondisi sistem internasional yang anarki, namun hal ini tidak berarti kerjasama tidak mungkin dilaksanakan.⁹⁵

Neo-liberal institusionalis berpendapat bahwa kekerasan dan anarki dalam sistem internasional dapat diatasi melalui pembentukan institusi bagi kerjasama internasional. Kerjasama dimungkinkan melalui peran mediator dalam institusi internasional, hukum internasional dan saling ketergantungan ekonomi. Institusi internasional dapat mengurangi biaya-biaya verifikasi, penguatan hubungan timbal balik dan membuat pelaksanaan norma-norma lebih mudah dilakukan.

Kohane berpendapat bahwa aktor-aktor non-negara sub ordinat ke negara. Negara adalah aktor yang rasional, egois dan atomistic. Neo-liberal institusionalis berasumsi bahwa negara hanya memiliki satu tujuan dalam interaksi internasional yaitu untuk mendapatkan keuntungan individu. Neo-liberal institusionalis berasumsi bahwa negara mendefinisikan kepentingan mereka dalam term-term individualistik. Demi mencapai keuntungan yang dimaksud diatas, negara-negara saling berkoordinasi kebijakan luar negeri mereka. Apabila mereka tidak melakukan kerjasama, interaksi antar negara dapat lebih kacau dan berbahaya sehingga negara tidak mendapatkan keuntungan apa pun.⁹⁶

Menurut neo-liberal institusionalis, organisasi internasional bertindak sebagai mediator dimana organisasi tersebut membantu kerjasama-kerjasama antar negara dan lembaga tersebut akan berkembang baik dalam daya jangkauan termasuk peningkatan jumlah anggota. Organisasi internasional, menurut neo-liberal

⁹⁴ Robert O Keo Hane *International Relations and State Power* . Bolder: Westview Press.1989
Hlm 8-9

⁹⁵ Ibid., Hlm 7

⁹⁶ Robert O Keo Hane Op Cit Hlm 9

institusionalis, adalah serangkaian aturan-aturan dimana pemerintah melakukan aksi dalam wilayah tertentu.⁹⁷

Legitimasi bukanlah hak mutlak dari suatu negara, namun sesuatu yang apat diperoleh melalui pemerintah yang humanistik dan melalui prosedur demokratis. Bagi Keohane, kerjasama ini tidak berjalan secara otomatis, namun membutuhkan perencanaan dan negosiasi.⁹⁸ Pada dasarnya struktur sistem internasional berada dalam kondisi anarki, sehingga diperlukan peranan organisasi internasional sebagai mediator serta sebagai tempat penyelesaian konflik. Dengan kerjasama antara Siprus dengan Uni Eropa yang terus menerus berinteraksi dan akhirnya diterima sebagai anggota Uni Eropa mengakibatkan sulitnya usaha Turki menjadi bagian dari Uni Eropa, karena Turki tidak mengakui Siprus Yunani maka ia menutup akses pelabuhan bagi Siprus.

Dalam peraturan Uni Eropa, setiap negara yang ingin berhubungan dengan Uni Eropa apalagi ingin masuk sebagai anggota Uni Eropa, mereka dituntut untuk memenuhi semua aturan Uni Eropa. Perubahan sistem internasional di Eropa setelah bubarnya Uni Soviet tahun 1991 mendorong Uni Eropa untuk semakin meningkatkan kerjasama serta mencakup bidang-bidang kerjasama yang lebih luas. Uni Eropa memberi sinyal untuk membuka pintu bagi anggota-anggota baru melalui isu perluasan (*enlargment*) khususnya dari negara-negara bekas komunis di kawasan Eropa Tengah dan Timur demi mencapai suatu integrasi yang lebih mendalam antar negara-negara di kawasan Eropa.

Isu perluasan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Uni Eropa untuk memperluas pasara bersama dan untuk memperkuat ideologi demokrasi dunia. Dalam konteks hubungan internasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan arah serta kebijaksanaan tingkah laku negara yang ditujukan ke negara lainnya merupakan usaha memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara yang ingin dicapai oleh negara tersebut diluar batas negaranya.

Seperti halnya Siprus, Turki memiliki kepentingan atas bantuan keuangan dari Uni Eropa untuk mendorong perekonomiannya, Turki mengharapkan kerjasama yang selama ini dijalin dengan Uni Eropa dapat meningkatkan

⁹⁷ Ibid., Hlm 10

⁹⁸ Ibid., Hlm 11

pengakuan dari masyarakat internasional bahwa mereka adalah negara yang menjunjung demokrasi dan lebih demokrasi dibanding negara Islam lainnya.

Posisi kedua negara memang sangat strategis Turki wilayahnya sangat luas dan berbatasan dengan Irak dan Iran, wilayah Turki dilalui oleh pipa minyak Eropa. Sedangkan Siprus meskipun merupakan negara pulau yang kecil tetapi posisinya yang sangat strategis dan dikelilingi laut Mediterania dan sebelah Selatannya berbatasan dengan Mesir dan Siprus adalah wilayah Uni Eropa yang paling Selatan.

Turki juga memiliki sumber daya manusia yang sangat besar jumlahnya dan juga bahan mentah yang tersedia sangat melimpah, Turki merupakan kekuatan terbesar setelah Amerika Serikat dalam NATO. Negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan integrasi. Motivasi pertama adalah adanya kemauan untuk membentuk pemahaman baru tentang Eropa dalam membangun suatu identitas bersama dan sebagai alternatif identitas kebangsaan. Kedua, adanya keinginan untuk hidup berdampingan secara damai, terutama untuk melindungi diri dari ancaman ekspansi komunis.

Perlu diingat bahwa saat perang dingin Turki merupakan zona penangkal masuknya komunis. Ketiga, adanya motivasi untuk mencapai kemakmuran. Keempat, motivasi untuk mengembangkan konsep kebebasan dan mobilitas barang, jasa, modal serta manusia dikawasan Eropa Barat. Kelima, adanya upaya untuk menciptakan suatu ketentuan baru dari negara-negara Eropa Barat agar dapat menjalankan peran politiknya dalam skala regional maupun global.

Salah satu prioritas utama pada pemerintahan Presiden Turki saat ini adalah kepastian akan status Turki dalam keanggotaan Uni Eropa, menjadi anggota secara penuh dan bukan sebagai mitra utama dari Uni Eropa. Melalui kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kondisi ekonomi di Turki, sehingga dapat mempercepat masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

Kerjasama yang dilakukan antara Turki dan Uni Eropa diawali dari kerjasama di bidang perdagangan, reformasi ekonomi, dan pasar domestik, reformasi ekonomi menyangkut upaya privatisasi, perkembangan sektor keuangan dan transportasi dalam kegiatan perbankan. Pasar domestik meliputi hak-hak

kekayaan intelektual, liberalisasi pergerakan modal, sertifikasi, standardisasi produk serta investasi. Kemudian kerjasama tersebut meluas ke arah pertanian, lingkungan hidup, masalah hukum dan keadilan.

Pada situasi globalisasi saat ini, salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah transaksi perdagangan luar negerinya, baik nilai ekspor maupun impornya. Bagi negara-negara maju, mayoritas perekonomiannya bergantung pada pertumbuhan industri manufaktur yang didukung oleh industri menengah dan kecil termasuk faktor teknologi yang akan meningkatkan daya saing suatu produk. Sedangkan bagi sebagian negara lain, terutama negara-negara miskin dan berkembang, perekonomiannya bergantung pada sumberdaya alam serta pengelolannya.

Pendapatan perkapita masyarakatnya terus meningkat, dari 1.539 dollar AS pada tahun 1980, naik menjadi 2.687 dollar tahun 1990 dan diharapkan akan menjadi 3000 dollar AS di tahun 1996. Perekonomian Turki diharapkan tumbuh 5 sampai 6% pertahunnya. Perkembangan ekonomi Turki sungguh-sungguh seperti tercantum dalam *Turkey Almanac* tahun 1995.

Sampai dengan tahun 1980-an, industrialisasi dan usaha pembangunan di Turki dibentuk oleh kebijaksanaan impor, melindungi hambatan bagi impor dengan tarif tinggi dan kuota, suku bunga riil negatif dan menilai mata uangnya terlalu tinggi.

Kebijaksanaan yang mendorong lonjakan kenaikan inflasi pada dasarnya disebabkan defisit anggaran yang besar, dalam bentuk pembiayaan yang tak akan terpikul, sehingga menimbulkan lingkaran persoalan yang tak akan habis.

Strategi yang sebenarnya merupakan menekan upaya laju inflasi ini pada kenyataannya malah membuat lonjakan kenaikan harga yang akhirnya menyebabkan inflasi. Kebijakan nilai tukar guna mendorong nilai ekspor.

Strategi yang secara parsial telah berhasil mengendalikan dan menurunkan tingkat inflasi tahunan itu malah menjadi bomerang dengan melonjaknya impor membengkaknya defisit neraca perdagangan sampai dengan 65%.

Perluasan keanggotaan Uni Eropa dengan masuknya banyak negara pecahan Uni Soviet masih menyisakan sebuah dilema besar, yaitu Turki.

Sebagai negara berpenduduk kedua terbesar di Eropa setelah Jerman, Turki sampai saat ini masih terus berjuang untuk bisa diterima sebagai anggota Uni Eropa. Demografi negara yang sebagian besar wilayahnya masuk ke Benua Asia itu, yang mayoritas beragama Islam, dinilai sebagai salah satu sumber ketidaksetujuan banyak negara UE lainnya. Di awal tahun 2007, setelah proses negosiasi resmi dimulai sejak tanggal 3 Desember 2005, ternyata prosesnya tidak semulus proses negosiasi UE dengan 12 negara-negara Eropa Timur, Tengah dan Mediteranian.

Negosiasi UE dengan ke-12 negara tersebut sejak awal tidak memperlihatkan hambatan yang berarti. Berbeda dengan Turki yang sejak awal dihadapkan dengan berbagai isu seperti tersebut di atas. Bahkan saratnya isu-isu sensitif menyangkut Turki, mendorong para kepala negara anggota UE dalam pertemuannya di Brussel tanggal 14-15 Desember 2006 lalu, untuk menunda proses negosiasi yang telah berlangsung selama setahun.

Dalam pertemuan tingkat kepala negara tersebut, para pemimpin negara anggota UE sepakat untuk menunda negosiasi terhadap 8 bab (dari 35 bab yang dirundingkan), yang menjadi dasar bagi perundingan selanjutnya. Beberapa isu sensitif yang terkait antara lain adalah mengenai Cyprus, dimana UE mendesak Turki untuk mengakui Republik Cyprus, menarik sekitar 40 ribu pasukannya yang menduduki bagian utara pulau Cyprus, mencabut embargo kapal-kapal dan pesawat Cyprus berdasarkan Protokol Ankara, serta menyelesaikan sengketa Cyprus dalam kerangka PBB.

Masalah lain yang disorot adalah demokratisasi, dimana UE menyoroti perlunya kebebasan berbicara, terutama dikaitkan dengan pasal 31 hukum pidana Turki, yang memungkinkan dilakukannya tuntutan hukum atas dasar penghinaan bagi orang-orang yang sering mengkritik pemerintah Turki. Selanjutnya Turki juga dinilai masih enggan untuk melakukan pembicaraan mengenai kasus *genocide* di Armenia, menekan kebebasan beragama dengan memaksakan

sekularisme dan menekan hak-hak suku minoritas khususnya suku Kurdi dan Muslim Suni.

Ditunjolkannya isu-isu yang hingga kini menjadi keberatan di pihak Turki, merupakan langkah cerdas UE dalam merespon keinginan sebagian negara anggotanya untuk menunda masuknya Turki ke dalam UE. Mereka yang menginginkan penundaan umumnya beralasan mengenai perlunya UE untuk memprioritaskan penuntasan masalah internal, seperti masa depan Konstitusi UE pasca penolakan oleh masyarakat Perancis dan Belanda atau penyelerasan ketimpangan ekonomi antara negara anggota UE sendiri. UE dengan cerdas pula tidak menonjolkan isu agama dan budaya (Islam) sebagai alasan penundaan. "Kami memang berjuang keras untuk bisa menjadi anggota Uni Eropa, tetapi itu bukanlah segala-galanya. Kalaupun akhirnya nanti kami diputuskan tidak bisa diterima, perekonomian dan kehidupan masyarakat kami tidak akan terganggu. Masih banyak hal yang bisa kami lakukan tanpa perlu menjadi anggota Uni Eropa," keyakinan itu disampaikan M Raif Karaca, Ketua Departemen Urusan Afrika dan Asia Timur Kementerian Luar Negeri Turki.⁹⁹

Usaha yang dilakukan Turki untuk menjadi bagian penuh Eropa sudah dirintis 40 tahun lalu ketika negara itu menandatangani kesepakatan berasosiasi dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community*). Pencalonan Turki itu, dinilai beberapa kalangan, memberikan kesempatan kepada Eropa untuk menepis tuduhan bahwa mereka adalah "klub orang-orang Kristen".
100

Dengan jumlah penduduk 72 juta dan sekitar 99 persennya beragama Islam, Turki memang akan bisa memberikan warna yang lain ke dalam Uni Eropa (UE) jika negara itu bisa diterima. Akan tetapi, justru di situ pula letak persoalannya, perbedaan agama yang dianut dianggap juga sebagai perbedaan tata nilai dan cara pandang sehingga sejumlah negara UE langsung menolak bergabungnya Turki di UE. Meski motif agama ini tidak pernah diakui secara terang-terangan, bahkan selalu dibantah, motif tersebut nyatanya cukup sering disebut dalam diskusi-diskusi mengenai lamaran Turki jadi anggota UE.

⁹⁹ Dikutip dari Pernyataan Perdana Menteri Turki yang diakses melalui www.dw.com

¹⁰⁰ Ibid

Seyfi Tashan, Direktur Institut Kebijakan Luar Negeri Turki, Bilken University Ankara, berpendapat, jika melihat ada beberapa negara bekas Uni Soviet yang kini sudah menjadi anggota Uni Eropa meski banyak penduduknya beragama Islam, maka masalah agama kemungkinan besar bukan faktor utama sebagai alasan keberatan sejumlah rakyat Eropa. "Turki ini negara yang sangat sekuler, seperti umumnya negara Eropa. Jadi, untuk apa khawatir dengan kenyataan bahwa mayoritas warga Turki adalah pemeluk Islam," ujarnya.

Alasan yang disampaikan UE atas "lamaran" Turki memang beragam, antara lain catatan pelanggaran hak asasi manusianya yang di bawah standar UE, masalah pembantaian bangsa Armenia pada tahun 1915, persengketaannya dengan Yunani yang sudah lebih dulu menjadi anggota UE, masalah Siprus, serta sejumlah ketentuan perundangannya yang dianggap belum selaras atau masih "di bawah standar" UE.

Memang banyak sekali yang harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Uni Eropa, dan kami terus berusaha melakukan berbagai penyesuaian itu, papar Wakil Sekjen Gabungan Kamar Dagang dan Pertukaran Komoditas (TOBB) Turki Ali Emre Yurdakul.¹⁰¹

Menurut Yurdakul, pada tahun 2008 Komisi Eropa sudah mengumumkan laporan kemajuan Turki dan di sana disebutkan bahwa di bidang politik Turki sudah sepenuhnya memenuhi kriteria yang disyaratkan. Sekarang kami berusaha memenuhi kriteria ekonomi lainnya. Yang kami lakukan sebagai TOBB adalah menginformasikan kepada anggota mengenai apa itu artinya keanggotaan, bagaimana mereka harus menyiapkan diri dalam keanggotaan di UE karena ada kompetisi yang ketat dalam mendapatkan keanggotaan, tutur Yurdakul.

Sejak mengambil alih kursi pemerintahan pada tahun 2002, PM Recep Tayyip Erdogan dan Partai Pembangunan dan Keadilannya (AKP) telah berhasil menanamkan modal politiknya lebih luas dengan memperkenalkan reformasi untuk membawa Turki sejajar dengan standar-standar UE. Masalah-masalah yang

¹⁰¹ Ibid

semula dianggap tabu, seperti hak berbahasa warga Kurdi dan peran militer, kini bagian dari perdebatan sehari-hari. Turki bahkan sudah lebih dulu menjadi bagian "pakta militer Eropa", yaitu anggota NATO.

Akan tetapi, semakin kuat Turki berusaha memenuhinya dan bisa memenuhinya, tampak semakin jelas juga adanya motif lain dibalik penolakan sebagian Eropa terhadap Turki itu. Selain persoalan agama yang dianggap sebagai basis cara pandang yang berbeda, jumlah penduduknya yang besar, termasuk "daya jelajah" warga Turki ke seluruh wilayah Eropa sehingga ada kantong-kantong warga Turki hampir di seluruh negara Eropa, tampaknya memang menjadi salah satu "ancaman" bagi sebagian warga Eropa.

Prof Talat S Halman, Dekan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Bilken di Ankara, menilai bergabungnya Turki ke Uni Eropa hanyalah soal waktu karena secara tradisional hampir di segala bidang Turki sejak lama sudah berhubungan dengan Eropa. "Kalaupun secara formal, misalnya, tidak bisa menjadi anggota Uni Eropa, hubungan rakyat Turki dengan rakyat Eropa dari berbagai negara itu akan terus berlangsung dan tidak mungkin diputuskan," ungkapnya.

Masuknya Turki menjadi bagian Uni Eropa, seperti disampaikan Niyazi Euren Akyol, Sekretaris Pertama Wakil Dirjen untuk urusan Afrika dan Asia Timur Kementerian Luar Negeri Turki, akan sangat bermanfaat bagi banyak negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai sesama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Turki bisa menjadi pintu gerbang bagi produk-produk negara anggota OKI untuk bisa menembus pasar Eropa.

Keberadaan Turki di Uni Eropa juga tentu akan memberikan warna yang lain kepada Eropa. Setidaknya kami bisa memberikan wawasan mengenai negara-negara Islam kepada negara-negara Eropa sehingga mispersepsi bisa dikurangi

Sayangnya, dalam perjuangan menjadi anggota UE, Turki tampak berjuang sendirian. Memang ada sejumlah negara UE yang mendukung masuknya Turki, tetapi dukungan serupa itu hampir tidak pernah terlihat disampaikan

sejumlah negara lain di luar Eropa. Di sisi lain, Turki pun seperti tampak enggan meminta dukungan negara-negara di luar Eropa, dari Asia misalnya. Agaknya sekaranglah saatnya dukungan itu diberikan kepada Turki.

Sejak sepuluh tahun ini Parlemen Eropa melakukan studi situasi hak azasi manusia di seluruh dunia dan juga menilai kebijakan hak azasi manusia di dalam wilayah Uni Eropa. Pelapor khusus urusan hak azasi manusia Uni Eropa kali ini adalah anggota parlemen Eropa dari fraksi sosial demokrat Spanyol, Raimon Obiols i Germà.

Laporannya mengenai situasi hak azasi manusia ini disetujui 429 anggota parlemen. Hanya 36 orang yang menolaknya, dan 55 abstain. Sejak tahun 2007, isi laporan hak azasi manusia Uni Eropa tidak banyak berubah, hanya kritik terhadap Rusia dilontarkan dengan lebih halus, karena sejak tahun 2007, kasus pembunuhan wartawan Anna Politkovskaya masih menghiasi laporan tahun berikutnya.

Para anggota parlemen menyerukan agar Uni Eropa tidak hanya mengutuk pelanggaran hak azasi manusia di seluruh dunia, tapi juga memberikan contoh yang baik bagi seluruh dunia. Untuk itu Uni Eropa semestinya memperbaiki politik migrasi dan juga mengamati kritis kebijakan Uni Eropa dalam tindakan pemberantasan terorisme. Selain itu, Uni Eropa juga semestinya mengukuhkan penataan hak azasi manusia sebagai landasan perjanjian kerja sama dengan negara mitra.

Menurut Parlemen Eropa, negara-negara kandidat anggota Uni Eropa masih perlu memperbaiki situasi hak azasi manusia mereka, namun saat ini negara-negara itu menunjukkan kemajuan berarti. Misalnya, keputusan pemerintah Turki untuk mengizinkan siaran stasiun televisi berbahasa Kurdi. Namun, anggota parlemen tetap meminta Turki untuk lebih melindungi kebebasan berpendapat.

“Laporan ini menyatakan terutama posisi bersama institusi Uni Eropa mengenai situasi hak azasi manusia di Turki. Proses menuju keanggotaan masih

terbuka dan saya harap perundingan dapat ditutup dengan kesepakatan, tapi itu hanya dapat berjalan dengan lambat. Turki merupakan masyarakat muda yang merasa bahwa dirinya Eropa. Turki akan melanjutkan proses reformasinya,” ujar Obiols i Germà.¹⁰² Kesimpulannya, Turki memang dikritik dalam laporan ini, tapi kritiknya relatif halus. Hal itu dapat dipahami, dengan alasan taktis, demikian menurut wakil ketua fraksi sosial demokrat Parlemen Eropa, Hannes Swoboda.

Uni Eropa memiliki misi meningkatkan kualitas hidup yang merata dan memperkaya identitas budaya bersama. Banyak perbaikan dilakukan dalam hal kebijakan mengenai ekologi, ekonomi, emansipasi wanita, seni dan musik, ilmu pengetahuan, legislasi, hukum sosial serta problem migrasi. Pada tahun 2007 ini EU merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan GDP sebesar US\$ 15.7 triliun. EU memberlakukan satu pasar (single market) dengan kebijakan-kebijakan yang sama bagi seluruh anggotanya. Di sini terlihat bahwa keadilan benar-benar dijunjung tinggi.

Banyak negara-negara lain di kawasan Eropa berlomba-lomba untuk bisa menjadi anggotanya. Negara yang sekarang berusaha menjadi anggota EU adalah Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro dan Serbia. Rencana keikutsertaan Turki dalam EU masih diperdebatkan karena perbedaan jumlah penduduk dan kebudayaan yang terlalu besar (Islam konservatif) serta standard hidup yang masih rendah, namun perjuangan pemerintah Turki yang sekuler ini tetap mendapat banyak dukungan. Dalam kasus ini nampaknya perbedaan ideologi bisa mengalah terhadap kesadaran untuk maju.

Namun tidaklah mudah untuk bisa menjadi anggota EU. Sistem administrasi negara, masalah hukum dan hak azasi serta kebijakan ekonomi harus disetarakan dengan standard EU untuk menjamin terwujudnya sinergi yang kuat.

EU sepakat mendistribusikan dana bersama (1,045% dari GDP EU) untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang vital, seperti infrastruktur lintas-perbatasan dan jaringan Trans-Eropa, terutama di negara-negara anggota barunya. Semua anggota harus mencapai tingkat ekonomi yang kompetitif sesuai dengan

¹⁰² Ibid

yang ditargetkan, yang apabila tidak tercapai akan ditindaklanjuti dengan sanksi. Konstitusi EU yang berdasarkan demokrasi, hak azasi manusia dan keadilan, dilengkapi dengan Dewan, Komisi dan Parlemen khusus.

Kepimpinan dipegang oleh presiden EU yang secara syah dipilih bergilir setiap 1,5 tahun di antara anggota-anggota yang termasuk dalam Dewan Negara-Negara Uni Eropa. Namun presiden EU tidak memiliki kekuatan legislatif maupun eksekutif, melainkan semata administratif, misalnya mengatur pertemuan dan memimpin sidang. Saat ini Komisi EU terus bergelut dalam tugas berat memformulasikan kebijakan-kebijakan bersama terutama berkaitan dengan bertambahnya jumlah anggota.

Perjalanan Turki untuk masuk menjadi bagian Eropa memasuki babak baru. Pemimpin Uni Eropa akhirnya bersepakat memulai pembicaraan keanggotaan Turki ke Uni Eropa. Babak baru ini memang tidak akan berjalan mulus, karena masih banyak jalan yang harus ditempuh oleh negara ini.

Sebagai awal permulaan, pegawai sipil Turki akan di undang ke markas Uni Eropa Brusels untuk mempelajari aspek hukum Uni Eropa. Pada saat bersamaan, pejabat-pejabat UE akan mempelajari detail perundang-undangan Turki, guna menentukan bidang apa saja yang akan mnjadi negosiasi fase pertama.

Perundingan itu adalah proses yang terbuka dan hasilnya belum bisa dipastikan kapan selesainya, paling cepat tahun 2014 Turki diterima sebagai anggota Uni Eropa. Hal ini dikarenakan oleh anggaran 2007-20013 yang sedang diperdebatkan tidak cukup untuk biaya akses Turki.

Turki akan memasuki proses yang panjang. Ada berbagai persyaratan yang harus dibenahi seperti sistem perundang-undangan, demokrasi, dan memperbaiki kinerja militer. Setelah satu sistem perundangan-undangan yang menjadi hambatan dalam RUU perselingkuhan. Paket RUU yang akan menggantikan hukum pidana Turki yang berumur 78 tahun itu disambut positif kalangan UE. Didalamnya terdapat hukman yang lebih berat bagi yang melakukan penyiksaan maupun pemerkosa. Juga terdapat klausul mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang untuk pertama kali diatur dalam undang-undang Turki.

Namun, RUU itu menimbulkan kontroversi karena meletakkan permasalahan perselingkuhan di bawah pengadilan sipil. Turki diancam tidak bisa menjadi anggota UE jika tetap mengegolkannya. RUU itupun dikaji ulang seluruh pake hukum pidana tersebut agar memenuhi kriteria Copenhagen dan kriteria Maastricht. Kriteria tersebut merupakan syarat bagi setiap negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa.

Pada akhir september 2004 dalam kunjungan ke pemimpin UE di Brussels, Perdana Menteri Turki Edrogan akhirnya menegaskan, RUU perselingkuhan dibatalkan dan Turki akan mengadopsi paket hukum pidana baru. Dan masalah Turki pun masuk dalam agenda dalam pertemuan UE pada desember 2004.

Friksi lain yang muncul adalah tuntutan parlemen Eropa agar Turki mengakui membantai etnis Armenia pada 1915 yang dilakukan Ottoman. Masalah pembantaian ini merupakan isu signifikan bagi Perancis, khususnya dipihak oposisi.

Ganjalan lain terkait dengan masuknya Siprus dalam keanggotaan Uni Eropa. Padahal, Turki belum mengakui negara Republik Siprus Yunani. Siprus terbagi berdasarkan etnis pada 1974, ketika pasukan Turki menguasai wilayah utara Siprus. Saat ini hanya Siprus Selatan yang masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Semua ganjalan tersebut menyebabkan Austria dan Denmark mendukung keinginan Turki masuk dalam keanggotaan Uni Eropa dulunya, tetapi mereka beranggapan bahwa Turki cukup menjadi mitra khusus Uni Eropa saja.

Turki menolak mitra khusus. Masuknya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dianggap akan menyulitkan penyatuan Politik, dan Ekonomi karena dengan jumlah penduduk dan luas wilayah terlalu luas akan menyebabkan Turki memiliki lebih banyak kekuasaan di Uni Eropa. Turki dipandang miskin sehingga masuknya Turki akan menelan banyak dana Uni Eropa.

Dengan masuknya Turki dalam Keanggotaan Uni Eropa akan menyulut gelombang imgran Truki ke negara-negara Uni Eropa. Paling tidak membanjirnya tenaga kerja murah ke negara-negara Eropa Barat yang lebih makmur akan mempengaruhi perekonomian Eropa secara umum. Hal itu pula yang

memunculkan kewenangan Uni Eropa membatasi arus migrasi Turki samapi waktu tak terbatas, namun hal itu masih diperdebatkan.

Ancaman tersebut wajar jika dikaitkan dengan penolakan kaum pekerja Perancis terhadap konstitusi Uni Eropa. Salah satu penolakan itu karena bergabung nya Perancis dalam Uni Eropa justru meningkatkan angka pengangguran. Perusahaan-perusahaan lebih memilih pekerja dari kawasan Eropa Timur.

Para pendukung Turki mengatakan, sekalipun kekhawatiran akan tenaga kerja muda dan murah, Eropa harus melihat itu sebagai berkah yang dapat membantu kerisis demografi, dimana populasi penduduk dewasa Eropa meningkat dan tingkat kelahiran turun. Beberapa pekerja mengatakan hal itu menyangkut hal penting yakni membangun kompetisi seperti Cina dan India yang memasuki abad kekuatan ekonomi. Tanpa Turki, Eropa akan gagal membiayai kebutuhan dari penduduk dewasa.

Memang sangat panjang perjalanan yang harus dilalui oleh Turki. Bahkan apabila negosiasi selesai, Perancis dan Austria akan menggelar referendum untuk meratifikasi atau tidak traktat aksesinya Turki. Apabila ada diantara 25 negara anggota yang tidak mau meratifikasi traktat tersebut, maka Turki tidak akan bisa bergabung dengan Uni Eropa.

Salah satu hambatan besar yang harus diselesaikan adalah menyangkut kultur dan identitas Eropa. Turki merupakan negara Islam terbesar di Eropa dianggap bisa menjadi ancaman terhadap kultur dan identitas yang selama ini melekat dengan Eropa.

Turki secara kultural bukan dianggap Eropa. Pandangan bahwa Uni Eropa adalah sebagai klub orang Kristen masih melekat di tengah beberapa partai Demokrat Kristen di sekeliling Eropa menurut Jacques Chirac, Turki harus melakukan revolusi budaya untuk diterima menjadi anggota Uni Eropa, dan ia menghawatirkan berkembangnya fundamentalis Islam melalui Turki.

Menurut Tayyip Erdogan, dengan dimulainya pembahasan keanggotaan Turki merupakan kemenangan atas prasangka agama. Dengan demikian anggapan Uni Eropa merupakan klub Kristen pun telah ditepis. Kesepakatan yang telah

dicapai pada 3 Oktober lalu adalah kesuksesan Turki. Dengan mulai membicarakan Turki membuktikan Uni Eropa bukanlah sebuah klub Kristen.

Bahkan menurut organisasi konferensi Islam (OKI) mengatakan, dimulainya pembicaraan itu sebagai jalan menuju dialog antara kewarganegaraan . dengan suksesnya Turki, meningkatkan rasa percaya diri dan keteguhan hati diantara negara-negara dari dunia Islam, untuk mengikuti proses demokrasi dalam mengonsolidasi perdamaian di kawasan dan dunia.

Menurut Olli Rehn, komisaris perluasan keanggotaan Uni Eropa, pada bulan September, ia menyatakan bahwa reformasi konstitusi akan lebih mempercepat proses penyatuan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa.

Pengakuan masuknya Turki ke Uni Eropa merupakan pembuktian pada dunia, bahwa Turki bukan negara konservatif seperti negara Timur Tengah lainnya.

Adalah mimpi Kamal Attartuk untuk mmebawa negaranya menuju era modern setelah ia menghapus sistem khalifah, mengganti tulisan arab dengan abjad roman.¹⁰³

Ironisnya, sebuah partai dengan akar Islamis, Justice and Developmen Party (AKP), maju untuk membawa Turki menuju Eropa, dan hal yang patu dunia paling menarik, usaha ini dilakukan pada masa setelah tragedi 9-11 dimana saat itu dunia Barat menganggap cendrung menganggap Muslim sama dengan teroris. Dan bagai manapun Turki adalah negara muslim yang lebih modern.

Pimpinan AKP dan PM Tayyip Erdogan, sangat serius dalam memenuhi persyaratan Uni Eropa. Siaran berbahas Kurdi telah diperkenalkan pada bulan Juli lalu. Hukuman mati telah dihapus dan penyiksaan narapidana dalam penjara pun telah dilarang..yang paling fenomenal, dominasi militer atas pemerintah dalam bentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) telah dipersempit dengan cara menempatkan sipil sebagai kepala dan memberi kekuasaan lebih pada perwakilan yang dipilih rakyat.

Disamping itu Ankara mendapat simpati dari Eropa dengan menyetujui Sipprus Utara yang dibawah Turki untuk melakukan referendum reunifikasi

¹⁰³ Profil dan Potensi Negara Turki. *Deperindag Badan Pengembangan Ekspor Nasionakl Pusat Pengembangan Wilayah Pasar*. 1996 Hlm 1

sesuai formula PBB, yang di tolak Yunani yang lebih dahulu telah menjadi anggota Uni Eropa.

Menurut kalangan konservatif Turki, konstitusi yang berlaku di Turki sudah sering di amandemen (79 ayat telah diubah dan 13 amandemen telah di tambahkan dalam 26 tahun terakhir). Karena itu yang diperlukan sekarang ialah sedikit amandemen tambahan saja. Tetapi kelompok lain, dari kalangan sipil dan akademisi justru berpendapat bahwa Turki perlu menyelenggarakan musyawarah konstitusi dan merevisi konstitusinya secara menyeluruh, menurut mereka bahwa semangat yang ada dalam dokumen konstitusi saat ini harus diperbaharui. Mereka juga berpendapat bahwa Turki sudah tidak lagi dalam kekuasaan militer, dan sudah seharusnya konstitusinya mencerminkan hal tersebut.

Tetapi, meyakinkan para pemimpin politik bahwa reformasi konstitusi itu lebih diperlukan sekarang dan bukan nanti, serta memelihara *political will* untuk melaksanakannya bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, jika kita mengamati pernyataan Menteri Luar Negeri, Babacan, dan pernyataan pemimpin lainnya, reformasi konstitusi ini harus dilakukan, Turki membutuhkan kerangka konstitusi yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan melanjutkan reformasi.

Uni Eropa dan Turki mempersiapkan jawaban yang tepat untuk menanggapi satu pertanyaan khusus para wartawan. Yaitu pertanyaan terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dua minggu lalu, yang sampai sekarang masih melekat dalam ingatan menteri, komisaris dan wartawan. Dalam pandangan Obama, Turki termasuk Uni Eropa.

Dalam kunjungannya ke Eropa, Obama sempat singgah ke ibukota Ceko, Praha, yang merupakan lokasi pertemuan terakhir pembahasan penerimaan Turki ke Uni Eropa yang baru berakhir. Seorang wartawan menanyakan menteri luar negeri Ceko yang kini juga memegang jabatan ketua Dewan Eropa, Karel Schwarzenberg mengenai upaya Obama mendorong keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa. Schwarzenberg menanggapi dengan mengingatkan, memang pertemuan Uni Eropa dan Turki untuk mempercepat proses penerimaan Turki ke Uni Eropa: "Alasan kami bertemu di sini adalah untuk hal itu. Saya pikir, seruan

Presiden Obama sangat baik, namun sebenarnya pintu-pintu ke arah itu sudah terbuka."¹⁰⁴

Sementara komisaris Uni Eropa untuk urusan penerimaan anggota baru Olli Rhen melontarkan pernyataan yang lebih diplomatis. Rhen merasa gembira bahwa Obama dan Uni Eropa mempunyai kepentingan yang sama. Namun Rhen menekankan, Turki seharusnya berusaha berdamai dengan Armenia sekaligus menuntut, agar reformasi dilakukan segera: "Kami memacu Turki untuk merancang ulang sebagian konstitusinya. Seperti menjamin hak dan kebebasan warganya. Reformasi ini tidak hanya penting bagi proses masuknya Turki ke Uni Eropa, akan tetapi penting untuk Turki sendiri."¹⁰⁵

Sebaliknya Menteri Luar Negeri Turki Ali Babacan menyatakan, rangka perundingan penerimaan Turki sebagai anggota baru menuntut agar babak-babak perundingan diselesaikan dengan cepat. Babacan menolak segala bentuk penundaan yang beralasan politik. Sampai sekarang perundingan dibagi menjadi sepuluh babak dan hanya bagian ilmu dan penelitian yang bisa dibilang sudah tuntas. Babacan menekankan masih terlalu dini untuk memperdebatkan hasil akhir dari perundingan ini.

Proses penerimaan Turki sebagai anggota baru Uni Eropa telah disepakati secara mutlak oleh seluruh anggota Uni Eropa. Semakin lama kami mengamati, bahwa setiap negara anggota mempunyai gambaran lain terkait hasil akhir proses ini. Hal ini selalu berubah terutama setelah menggelar pemilihan umum dan pergantian pemerintahan. Tapi itu hal yang wajar.

Dengan pernyataan tersebut Menteri Luar Negeri Turki menyindir Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, yang menentang Turki sebagai anggota baru Uni Eropa. Mulai pertengahan tahun ini pemerintah Swedia akan menggantikan Ceko sebagai ketua Dewan Eropa. Karena itu juga, Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt hadir dalam pertemuan tersebut. Bildt mengatakan, Turki adalah mitra terpenting Uni Eropa kedua setelah Amerika Serikat.

¹⁰⁴ Ibid Hlm 33

¹⁰⁵ Ibid Hlm 35

Sektor industri di Turki merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomiannya. Industri petro kimia meningkatkan terus produksinya seperti poly propylene, ethyl line oxide, ethy line glycol, triper dan acritonitrile. Industri keramik dan industri karet sudah lama beroperasi malahan sejak kekaisaran Ottoman sudah ada produk porselen.

Industri semen meliputi berbagai jenis produksi semen dan batu bara. Industri perikanan Turki didasarkan pada penangkapan ikan disepanjang pantai utara dan diselat yang memisahkan bagian Asia dan Eropa dengan memanfaatkan perpindahan ikan dari laut Hitam ke laut Tengah. Industri besi dan baja dipusatkan di pantai laut Hitam yaitu tempat tambang batu bara Eregh dan Kirshir (tenggara Ankara). Kompleks pabrik baja dipelabuhan Aberden tergolong sebagai pabrik terbesar di Timur Tengah dengan 2 juta ton setiap tahun.¹⁰⁶

Istambul dengan fasilitas perdagangan dan transportasi, memiliki banyak industri yang menarik termasuk industri tembakau tekstil dari wol, bahan kimia dan bahan makanan, oleh karena itu pemerintah menyebarkan industri kesemua daerah memperoleh keuntungan, maka adanya Kayseri menjadi pusat bentuk tekstil dari kapas, telah menjadi pusat rersebar untuk permintaan gula dan kapas menjadi pusat pengolahan susu kering. Industri hasil kerajinan, seperti lilin (permadani anyaman sutra) terkenal dan bermutu tinggi.

Sektor Perdagangan

Dari sudut libarelisasi ekonomi, penguatan nilai tukar TL di atas nilai rill, bertentangan dengan tujuan antara lain peningkatan ekspor (EOI strategi) karen mengakibatkan penurunan daya saing di pasar global. Dengan pengendalian inflasi melalui penguatan TL akibatnya tidak hanya pada penuruna daya saing ekspor juga dengan melonjaknya impor. Menurut dari DIE impor selama 1995 adalah US\$ 35,7M. Meningkat US\$ 23,7 M.

Pilihan Ciller untuk mempererat depresiasi Tl terhadap mata uang utama, pada tahap awal, sebetulnya berhasilkan mengendalikan laju inflasi dan

¹⁰⁶ Ibid Hlm 40

mendorong dinamika pertumbuhan perekonomian domestik. Bahkan pertumbuhan ekonomi (GNP) naik mencolok mencapai 10% pada kuartal ketiga 1995 dalam tingkat harga konstan 1987.

Menurut data dari Intitut Statistik Negara (DIE) pertumbuhan domestikbruto (GDP) dalam tingkat rill adalah 9,5, sementara GNP selama Januari-September 1995 adalah 7,9%. Dengan posisi tersebut terjadi perbaikan radikal dari pertumbuhan minus (-) 61% pada periode yang sama tahun 1994.¹⁰⁷

Sektor industri merupakan penyumbang terbesar untuk pemulih ekonomi dengan kenaikan produksi selama 1995 adalah 12,2% dibandingkan dengan periode 1994. Sektor yang pertumbuhannya cukup pesat lainnya masing-masing adalah perdagangan 11,6%, jasa 7,5%, transportasi dan komunikasi 5,9% serta lembaga keuangan 0,4%. Sementara itu sektor yang mengalami pertumbuhan adalah konstruksi yang minus (-) 4,7%.

Pertumbuhan sektor swasta selama 1995 yang naik 20,9% dibandingkan dengan penurunan 11,8% tahun 1994 memperlihatkan keberhasilan strategi untuk memperkecil peranan negara dalam perekonomian. Tanda-tanda akan berlanjutnya pemulihan ekonomi tersebut diperkuat lagi dengan meningkatkannya jumlah pembentukan perusahaan baru yang selama Oktober 1995, menurut data dari DIE, berjumlah 3.924 perusahaan baru dan dengan pencatatan modal sebesar TL 7,49% triliun.

Walaupun selama periode tersebut dilaporkan juga penutupan sejumlah 1.036 perusahaan, yang mengisyaratkan masih kentalnya pengaruh tekanan ekonomi, bayang-bayang pemulihan ekonomi semakin kentara dengan meningkatnya upaya pembentukan bank yang memaksa pemerintah mengeluarkan persyaratan baru pendiri bank.

Dalam pengelolaan anggaran, kendatipun terjadi defisit sebesar TL 316,6 triliun, pemerintah merasa telah mencapai sasaran penting. Target tersebut antara lain pencapaian penerimaan 99,7% dengan sejumlah TL 1,4 kwadriliun (naik 86,6% dibanding tahun 1994) dan penurunan tingkat kenaikan pengeluaran dari 109,9% tahun 1994 menjadi 90,7% tahun 1995.

¹⁰⁷ Ibid Hlmaman 45

Selama 1996 kementerian keuangan menetapkan target penerima pajak sebesar TL 1,08 kwadriliun, penerimaan bukan pajak dan dana khusus dengan jumlah masing-masing TL 83,7 triliun dan TL 234,14 triliun. Meski demikian ada kekhawatiran yang sangat mendesak untuk anggaran 1996/1996 yang mulai berlaku tanggal 1 april 1996. Menurut menteri keuangan Lutfulah Kayalar, kendatipun perkiraan anggaran seperti pembayaran bunga utang domestik. Tahun 1996 pemerintahan telah mempersiapkan pembayaran bunga utang domestik sejumlah TL 796 triliun.

Namun untuk pembayaran bunga utang selama dua bulan pertama 1996 saja sudah berjumlah TL 173 triliun. Kekhawatiran Kayalar tersebut pada dasarnya merupakan inti persoalan perekonomian Turki. Dalam penilaian analisis persoalannya terletak pada keberhasilan UT untuk memasarkan Tbill dan menjadi sumber dana untuk pembayaran berbagai bunga hutang-hutang domestik yang jatuh tempo serta pembayaran yang jatuh tempo serta pembayaran gaji rutin sektor publik.

Namun yang selalu dilupakan dengan keberhasilan pemasaran T-bill dan juga perpanjangan jatuh temponya adalah lonjakan hutang domestik menjadi TL 1,5 quadriliun dan peningkatan bunganya. Menurut analisis akan sangat diragukan keberhasilan peningkatan penerimaan dari pajak (kendatipun baru dilaksanakan reformasi sistem perpajakan) akan mampu melunasi pembayaran hutang dan bunga hutang domestik selama 1996, terutama dengan perkiraan hilangnya penerimaan pabean dari Uni Eropa (EU) dengan penandaan tangan persamaan pabean (CU) dengan EU. Selama empat bulan pertama 1996 saja Kayalar memperkirakan defisit anggaran sudah mencapai TL 400 triliun.

Meskipun demikian, IMF yang merupakan arsitek perancangan liberalisasi ekonomi, optimis dengan perkembangan perekonomian Turki. Bahkan IMF yakin dengan terus dilaksanakannya program swastanisasi Turki akan berhasil menurunkan inflasi ketingkat 50%. Karena itu tidak heran IMF mendukung pembiayaan program ekonomi dengan menyediakan sejumlah paket pinjaman khusus. Dalam pencarian dana paket pinjaman ke-5 sejumlah US\$ 116 juta, Dewan Eksekutif IMF menegaskan, bahwa peminjaman tersebut dilakukan karena Turki telah memenuhi kriteria yang mengharapakan IMF.

Kriteria tersebut antara lain tercermin dengan keberhasilan pengetatan lonjakan nilai tukar dan kenaikan inflasi.

Antara perkiraan optimisme IMF tersebut dapat disebut sebagai momentum pemulihan ekonomi, asumsi tersebut tampaknya tidak bertahan lama karena terganggu oleh krisis politik karena pecahnya pemerintah koalisi DYP-CHP yang memaksa Ciller untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Demirel.

Tekanan pelaksanaan pemilu tanggal 24 desember 1995 tidak saja menghambat semua peluang purnaikan ekonomi juga langsung mempengaruhi semua instrument keuangan yang diharapkan dapat dikendalikan antara lain tingkat bunag, inflasi dan nilai tukar. Bahkan beberapa kebijaksanaan ekonommi Ciller, yang menjadi pengendalian pemerintah sementara sampai terbenruknya pemerintah hasil pemilu kemudian dicurigai sebagai upaya pemenangan pemilu.¹⁰⁸

Turkey Exports by Product Section in US Dollars - Yearly ¹⁰⁹

Section	2001	2002	2003	2004	2005	
0 - Food and live animals	\$3,316,181,000	\$3,071,256,000	\$3,943,801,000	\$5,044,325,000	\$6,512,339,000	All countries
1 - Beverages and tobacco	\$471,094,000	\$425,670,000	\$488,614,000	\$590,940,000	\$736,445,000	All countries
2 - Crude materials, inedible, except fuels	\$607,577,000	\$685,301,000	\$916,570,000	\$1,172,974,000	\$1,334,833,000	All countries
3 - Mineral fuels	\$444,538,000	\$683,083,000	\$980,128,000	\$1,429,137,000	\$2,641,023,000	All countries

¹⁰⁸ Ibid Hlmaman 45

¹⁰⁹ Diakses melalui [www. Indexmundi.com/http. Eksport Turkey. Html](http://www.Indexmundi.com/http.Eksport%20Turkey.Html) tanggal 1-7-09 Pukul 01.00 Wib

lubricants and related materials						
4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes	\$180,495,000	\$96,450,000	\$254,730,000	\$205,451,000	\$405,300,000	All countries
5 - Chemicals and related products, n.e.s.	\$1,272,078,000	\$1,370,090,000	\$1,725,205,000	\$2,342,365,000	\$2,801,266,000	All countries
6 - Manufactured goods classified chiefly by material	\$9,453,058,000	\$10,495,875,000	\$13,204,590,000	\$18,586,791,000	\$20,408,933,000	All countries
7 - Machinery and transport equipment	\$7,152,448,000	\$8,587,499,000	\$12,370,221,000	\$18,275,353,000	\$21,005,357,000	All countries
8 - Miscellaneous manufactured articles	\$8,099,397,000	\$9,878,182,000	\$12,658,869,000	\$14,757,837,000	\$15,947,496,000	All countries
9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in the	\$337,079,000	\$468,574,000	\$710,113,000	\$715,782,000	\$1,106,838,000	All countries

SITC						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Dampak dari krisis politik tersebut mulai tersa dengan bergeraknya tingkat bunga yang berkisar 68,5 – 99% menjadi diatas 100%. Selain pengaruh akan dilaksanakannya pemil, peningkatan tingkat bunga juga dipicu oleh meningkatnya beban pembayaran hutang domestik. Pada akhir November 1995 hutang domestik bergerak dari TL 1,218 kwadriliun menjadi TI 1,248 kwadriliun.

Menurut data dari Under secretariat for Tresury (UT) selama 11 bulan tersebut hutang domestik naik 56,15% dibandingkan dengan total hutang domestik 1994. Dalam US\$ jumlah tersebut naik dari US\$ 21,3 miliar tahun 1994 menjadi US\$ 23,9 miliar dengan peningkatan 12%.

Selain itu spekulasi terjadinya devaluasi, atau setidaknya depresiasi tajam TL terhadap berbagai mata uang utama semakin kentara. Kendatipun Acting Gubernur Bank Sentral Osman Cavit menegaskan bahwa depresi TL akan sejalan dengan tingkat inflasi belanan ketidak pastian kondisi politik menyebabkan nilai tukar TL terhadap US\$ dan DM anjlok 3,6%. Meskipun demikian penurunan nilai tukar tersebut masih dibawah tingkat rata-rata inflasi bulanan yang mencapai 5-6%.

Tingkat heran posisi tersebut semakin mencuatkan kecurigaan bahwa pemerintah sengaja melambungkan nilai tukar TL terhadap mata uang utama sebagai bagian komitmen Turki terhadap IMF yang akan menjaga nilai tukar gabungan TL terhadap US\$ dan DM sejumlah TL 101.400 sampai akhir Desember 1995. Guna mendukung upaya memepertahankan overvalued TL tersebut Bank sentral melempar US\$ kepasar bebas dengan nilai tukar TL 53.170 per US\$.

Hutang luar negeri sampai pertengahan 1995 berjumlah US\$ 73,7 miliar, naik 12,5% dibandingkan dengan UDS 65,5 miliar pada semester pertama 1994. Walaupun demikian komposisi hutang luar negri didominasi oleh hutang jangka menengah dan panjang dengan total 80,7% dengan jumlah US\$ 59,25 miliar, mengurangi beban pembayaran segera. Menurut data dari UT selama empat tahu ini kewajiban pembayaran hutang luar negri selama 1995 adalah US\$ 9,88 miliar. Untuk tahun 1996 Turki harus melunasi pembayaran hutang luar negri sebesar

US\$ 11,07 miliar dan US\$ 10,4 miliar pada tahun 1997. Selama dua bulan pertama 1996 Turki sudah melunasi pembayaran hutang luar negeri sejumlah US\$ 1,21 miliar.

Pesoalannya sekarang adalah kondisi keuangan Turki yang semakin memburuk. Menurut laporan Bank Sentral Turki selama november 1995 defisit neraca transaksi berjalan mencapai US\$ 879 juta. Jauh melonjak dibandingkan defisit neraca transaksi berjalan bulan sebelumnya yang hanya berjumlah US\$ 25 juta. Dibandingkan dengan tahun 1994 yang surplus sebesar US\$ 2,5 miliar, defisit neraca transaksi berjalan selama 11 bulan pertama 1995 mencapai US\$ 958 juta.

Neraca Perdagangan Posisi neraca perdagangan selama 1995 tidak terlalu mendukung. Defisit neraca perdagangan berjumlah US\$ 14,07 miliar (65,04%), jauh di atas tingkat yang sama tahun 1994 yang hanya berjumlah US\$ 5,16 miliar (28,52%) selama 1995 ekspor naik US\$ 3,53 miliar (19,5%) tetapi lonjakan impor jauh lebih tinggi dengan kenaikan US\$ 12,43 miliar (53,5%).

Turkey Imports by Product Section in US Dollars - Yearly¹¹⁰

Section	2001	2002	2003	2004	2005	
0 - Food and live animals	\$735,741,000	\$1,047,645,000	\$1,604,010,000	\$1,817,607,000	\$1,615,878,000	All countries
1 - Beverages and tobacco	\$296,431,000	\$218,006,000	\$250,248,000	\$270,022,000	\$298,876,000	All countries
2 - Crude materials, inedible, except fuels	\$2,435,057,000	\$3,663,107,000	\$5,160,437,000	\$6,969,911,000	\$7,660,516,000	All countries
3 - Mineral fuels, lubricants	\$6,140,805,000	\$7,169,912,000	\$8,585,735,000	\$11,132,807,000	\$15,764,234,000	All countries

¹¹⁰ Diakses melalui www.Indexmundi.com/http.Imports.turkey.html tanggal 1-7-09 Pukul 01.00 Wib

and related materials						
4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes	\$321,012,000	\$413,905,000	\$512,100,000	\$531,907,000	\$744,731,000	All countries
5 - Chemicals and related products, n.e.s.	\$6,157,927,000	\$7,797,742,000	\$10,277,390,000	\$14,049,069,000	\$16,166,494,000	All countries
6 - Manufactured goods classified chiefly by material	\$6,642,758,000	\$8,766,293,000	\$11,623,540,000	\$16,523,007,000	\$19,989,660,000	All countries
7 - Machinery and transport equipment	\$12,635,622,000	\$15,593,104,000	\$21,509,601,000	\$33,704,169,000	\$37,808,892,000	All countries
8 - Miscellaneous manufactured articles	\$2,533,486,000	\$2,969,634,000	\$3,795,638,000	\$5,354,340,000	\$6,615,182,000	All countries
9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in the	\$3,500,236,000	\$3,630,837,000	\$6,020,992,000	\$7,186,928,000	\$10,109,685,000	All countries

SITC						
----------------------	--	--	--	--	--	--

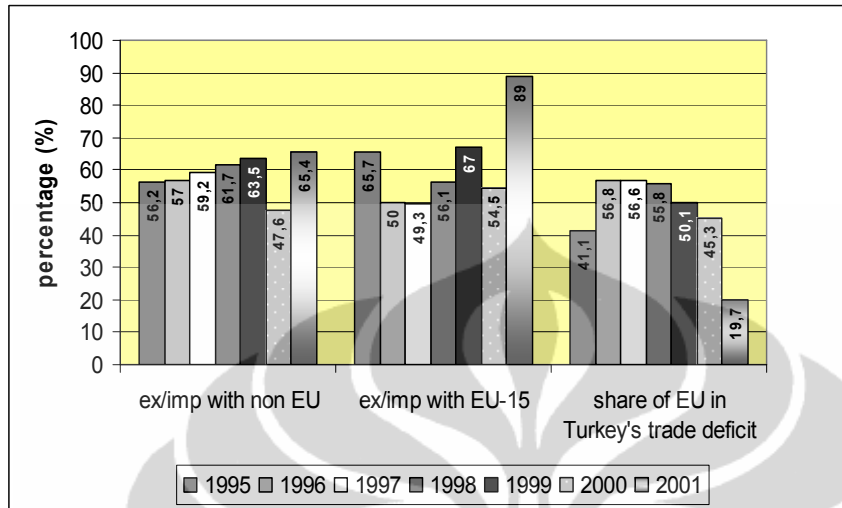
Sektor industri merupakan penyumbang ekspor sebesar dengan jumlah US\$ 18,91 miliar (87,4%), diikuti masing-masing oleh sektor pertanian dengan ekspor US\$ 2,31 miliar (10,7%) dan pertambangan 405,6 juta (1,9%). Sementara itu impor produk industri selama periode yang sama berjumlah US\$ 29,77 miliar (83,4%), pertambangan US\$ 3,47 miliar (9,7%) dan pertanian US\$ 2,45 miliar (6,9%). Dari komposisi ekspor didominasi oleh barang konsumsi senilai US\$ 12,57 miliar (58,1). Bahan mentah US\$ 5,54 miliar (25,6%), barang modal US\$ 3,52 miliar (16,35%). Sementara itu komposisi impor dilihat dari prospek perindustrian sangat bagus karena didominasi oleh bahan mentah US\$ 20,8 miliar (58,3%), barang modal US\$ 10,48 miliar (29,4%) dan barang konsumsi US\$ 4,41 miliar (12,4%).

Evaluasi Singkat Perdagangan Turki dengan Uni Eropa setelah Bergabung dengan Costum Union (dalam US\$)

Tabel 1: Perdagangan Turki dengan UE-15 dan Non Anggota UE (dalam US\$)

Sources: Undersecretariat of Foreign Trade, State Institute of Statistics, Eurostat.

Figure 2: Turkey's 'exports/imports ratio' for EU & non-EU



Countries.

Sources: Undersecretariat of Foreign Trade, State Institute of Statistics, Eurostat.

Table 1: Turkey's Trade in 1995 & 2001 by Main Partners.

Partners	1995					2001				
	Value of exp (mill. \$)	% Share	Value of imp (m. \$)	% Share	Trade balance	Value of exp (m. \$)	% Share	Value of imp (m. \$)	% Share	Trade balance
Total	21,637	100	35,709	100	-14,072	31,340	100	41,399	100	-10,059
EU-15	11,078	51.2	16,860	47.2	-5,782	16,078	51.3	18,059	43.6	-1,981
Germany	5,036	23.3	5,548	15.5	-512	5,367	17.1	5,335	12.9	32
USA	1,514	7.0	3,724	10.4	-2,210	3,134	10	3,261	7.9	-127
Italy	1,457	6.7	3,193	8.9	-1,736	2,342	7.5	3,484	8.4	-1,142
UK	1,136	5.3	1,830	5.1	-694	2,175	6.9	1,914	4.6	261
France	1,033	4.8	1,996	5.6	-963	1,895	6.1	2,284	5.5	-389
Russia	1,238	5.7	2,082	5.8	-844	924	3	3,436	8.3	-2,512
Japan	180	0.1	1,400	3.9	-1,220	124	0.4	1,307	3.2	-1,183

Sources: Undersecretariat of Foreign Trade, State Institute of Statistics, Eurostat.